

EVALUASI TERHADAP PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN DALAM PENINGKATAN  
KESADARAN POLITIK DAN PEMBENTUKAN IDENTITAS POLITIK KEBANGSAAN SISWA

Proposal Penelitian

Oleh:

Dr. Andi Thahir, M.A.

Dr. Erike Angraeni, M, Esy.

Tin Amalia Fitri, M.Si.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG

TAHUN 2019

## **BAB I PENDAHULUAN**

### A. Latar Belakang

Identitas politik adalah konstruksi yang menentukan posisi kepentingan subjek di dalam suatu komunitas, contoh dari suatu identitas politik adalah Indonesia. Sebelumnya Indonesia adalah istilah bagi ras berkulit coklat yang mendiami kepulauan Hindia, istilah Indonesia pertama kali diperkenalkan oleh George Samuel Windsor Earl.<sup>1</sup> Pada masa perjuangan untuk membebaskan diri dari penjajahan Bangsa-Bangsa Eropa terhadap penduduk di Kepulauan Hindia ini, Indonesia kemudian menjadi suatu identitas orientasi perjuangan untuk menjadi suatu wilayah yang bebas dari segala bentuk penjajahan. Selanjutnya Indonesia menjadi istilah etnografis maupun geografis, dan terbentuklah Negara Indonesia.

Para founding fathers Indonesia tentunya sangat menyadari tentang perlunya memelihara Pada dasarnya pendidikan kewarganegaraan yang diberikan di sekolah-sekolah merupakan salah satu bentuk upaya penanaman kesadaran politik kepada siswa, serta upaya penanaman identitas sebagai warga Negara Indonesia. Namun, kenyataan sosial masyarakat Indonesia dalam hal ini generasi muda menunjukkan betapa lemahnya identitas kewarganegaraan generasi muda, fenomena ini terlihat dari tingginya tingkat pelanggaran hukum dan sosial yang dilakukan oleh generasi muda.

Generasi muda pada dasarnya memainkan peranan penting sebagai warga Negara dalam masyarakat dan sistem politik kita. Dimasa depan generasi muda akan menjadi penduduk aktif yang perlu dipersiapkan pengetahuan politiknya sehingga mereka akan mempunyai kesadaran dan tindakan yang efektif secara politik. Baik-buruknya perlakuan terhadap generasi muda saat ini akan menentukan sehat tidaknya pelaksanaan demokrasi bangsa di masa yang akan datang.

---

<sup>1</sup>Elson, 2008

Secara tidak adil dan keliru generasi muda sering dituding atau diberi lebel sebagai generasi yang apatis dan tidak berkehendak menjadi generasi yang aktif dan bersemangat. Pada dasarnya sedikit sekali perhatian yang diberikan pemerintah terkait dengan kesadaran politik generasi muda, sedikit sekali kegiatan-kegiatan yang diarahkan agar generasi muda melek politik. Ditambah lagi tidak adanya pengujian secara mendalam mengenai dampak efektif pemberian mata pelajaran kewarganegaraan di sekolah terhadap kesadaran politik generasi muda.

Sebagai hubungan kausalitas rendahnya perhatian tersebut melahirkan sikap apatis dan pesimis generasi muda saat ini terhadap harapan-harapan politik dan juga rendahnya keterlibatan dan kemampuan dalam urusan-urusan politik, Dalam hal ini urusan-urusan politik terdiri dari persoalan yang terkait dengan kehidupan bermasyarakat dan juga kehidupan bernegara. Kemampuan dalam membaca isu-isu dan peristiwa-peristiwa politik merupakan gambaran tentang ada tidaknya kesadaran politik pada generasi muda atau disebut dengan melek politik yaitu kemampuan menggunakan ide-ide, bahasa, bentuk-bentuk fikiran, argument-argument ketika berhadapan dengan isu-isu publik.

Merespon kondisi tersebut maka merupakan suatu kebutuhan yang tidak terhindarkan untuk melakukan pemberdayaan terhadap generasi muda, dan juga terhubung dengan generasi muda kemudian memfasilitasi berbagai kesempatan bagi mereka sebagai warga negara, juga merupakan suatu kebutuhan untuk merubah cara pelaksanaan pengambilan keputusan lembaga-lembaga negara agar lebih memberikan perhatian kepada generasi muda.

Beragam kegiatan dan tindakan dapat dilakukan dalam rangka melaksanakan tugas dan memenuhi kebutuhan tersebut, yaitu sebagai berikut: memberikan pendidikan kewarganegaraan, menciptakan metode yang tepat untuk melibatkan generasi muda dalam urusan kemasyarakatan dan kenegaraan secara kelembagaan, dan memperbaiki informasi tentang kesempatan dan prosedur pelibatan generasi muda dalam urusan-urusan kenegaraan dan

kemasyarakatan yang dapat disebut sebagai kegiatan atau aktivitas politik generasi muda.

Berangkat dari beragam fenomena tersebut di atas, penelitian ini akan difokuskan pada tinjauan atau telaah terhadap pendidikan politik kewarganegaraan yang diberikan disekolah terutama kepada siswa sekolah menengah atas, untuk melihat efektifitasnya terhadap peningkatan kesadaran politik generasi muda, yaitu pendidikan yang dimaksudkan untuk membuat seseorang mampu membuat keputusan mereka sendiri, dan bertanggung jawab kepada diri sendiri dan masyarakatnya, serta berkontribusi terhadap proses politik. Lebih jauh pendidikan kewarganegaraan adalah pendidikan yang dilakukan untuk memperkuat hubungan antara penduduk, masyarakat, dan negara.

#### B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apa saja yang termasuk dalam element pendidikan kewarganegaraan?
2. Metoda apa yang digunakan dalam memberikan pendidikan kewarganegaraan kepada siswa?
3. Nilai, sikap, dan watak seperti apa yang menjadi tujuan pencapaian pendidikan kewarganegaraan?
4. Sejauhmana keberhasilan pemberian pendidikan kewarganegaraan kepada siswa sekolah menengah atas terhadap peningkatankesadaran politik siswa?
5. Sejauhmana keberhasilan pemberian pendidikan kewarganegaraan kepada siswa sekolah menengah atas terhadap pembentukan identitas politik kebangsaan siswa?

#### C. TUJUAN KEGIATAN

Tujuan dari kegiatan ini adalah:

1. Mengetahui rancangan pendidikan kewarganegaraan yang selama ini diterapkan di sekolah menengah atas.
2. Mengetahui konsepsi pendidikan kewarganegaraan yang selama ini diberikan kepada siswa sekolah menengah atas, terkait dengan peningkatan kesadaran politik siswa.
3. Mengetahui metoda pemberian pendidikan kewarganegaraan yang selama ini diberikan kepada siswa sekolah menengah atas, terkait dengan peningkatan kesadaran politik siswa..
4. Mengetahui berhasil tidaknya pendidikan kewarganegaraan yang selama ini diberikan kepada siswa sekolah menengah atas terhadap peningkatan kesadaran politik siswa.
5. Mengetahui berhasil tidaknya pendidikan kewarganegaraan yang selama ini diberikan kepada siswa sekolah menengah atas terhadap pembentukan identitas politik kebangsaan siswa.

#### D. MANFAAT KEGIATAN

Manfaat dari kegiatan ini adalah:

1. Memperkuat hubungan antara warga – komunitas - Negara
2. Meningkatkan koheisi social masyarakat
3. Meningkatkan kesadaran politik masyarakat terutama generasi muda
4. Meningkatkan partisipasi politik generasi muda
5. Meningkatkan keterlibatan generasi muda dalam aktivitas politik lembaga-lembaga Negara.
6. Mendorong keputusan politik yang lebih berpihak kepada generasi muda
7. Menciptakan generasi muda yang peduli kepada masyarakatnya
8. Menciptakan generasi muda yang bertanggung jawab terhadap semua tindakannya.
9. Menciptakan generasi muda mempunyai kemampuan untuk mengakses informasi yang terkait dengan isu-isu politik dan social

10. Menciptakan generasi muda yang mempunyai kemampuan untuk mengartikulasikan kepentingannya.

## **BAB II**

### **Landasan Teori**

#### **II.1. Kesadaran Politik**

Pada beberapa Negara seperti United Kingdom, perhatian terhadap pentingnya kesadaran politik oleh generasi muda di mulai sejak Tahun 2002. Perhatian ini muncul karena adanya kekhawatiran terhadap sikap apatis dan pesimistik generasi muda terhadap harapan-harapan yang bersifat politik, yang dalam hal ini diproyeksikan bahwa generasi muda saat ini akan menjadi penduduk aktif dimasa yang akan datang. Sikap ini tentu saja akan berpengaruh terhadap relasi antara penduduk – masyarakat – Negara. Tidak kalah penting juga dikhawatirkan sikap-sikap semacam ini akan mengganggu perjalanan demokrasi, rendahnya kepedulian terhadap isu-isu kenegaraan dan kemasyarakatan, dan rendahnya tanggung jawab terhadap perilaku dan keputusan pribadi.

Kesadaran politik merupakan bentuk nyata dari suatu keadaan yang disebut dengan melek politik atau “*political literacy*”, yaitu integrasi antara intelektual dan emosi (emphaty) dalam diri seseorang dalam upaya pemahaman politik, social, dan moral. Seseorang yang mempunyai kesadaran politik mempunyai keinginan dan mampu untuk mengambil tanggung jawab untuk diri mereka sendiri dan masyarakatnya serta mempunyai keinginan dan mampu berkontribusi dalam proses politik. Kapasitas Kesadaran politik pada diri seseorang ditandai oleh hal-hal berikut ini:

- Kesadaran tentang hak dan tanggung jawab sebagai warga Negara
- Menyatakan pendapat dan keberatan atau sanggahan yang dimiliki
- Aktif dalam isu-isu atau persoalan-persoalan di masyarakatnya
- Bertanggung jawab terhadap tindakan mereka di masyarakat
- Risau terhadap kesejahteraan dan hal-hal lainnya
- Mengetahui informasi social dan politik

- Mempunyai kemampuan untuk berpengaruh di dalam masyarakatnya

Kapasitas tersebut di atas tidak dapat berkembang tanpa bantuan, melainkan harus dipelajari, karena dalam masyarakat yang sangat kompleks dan majemuk, dibutuhkan kapasitas politik yang lebih agar dapat mengambil bagian dalam aktivitas tertentu di masyarakatnya.

Identitas politik adalah suatu konsepsi yang merujuk kepada konstruksi yang menentukan posisi kepentingan subjek di dalam suatu ikatan komunitas politik, Identitas politik terkonstruksi melalui rasa kepemilikan dan rasa perbedaan, contoh dari identitas politik adalah nasionaliti atau kewarganegaraan. Sedangkan konsepsi identitas politik kebangsaan adalah suatu konsepsi yang bersumber dari semangat perjuangan bangsa Indonesia untuk mencapai kemerdekaan, yaitu semangat persatuan dan kesatuan masyarakat Indonesia yang terdiri dari bermacam-macam suku, agama, dan ras.<sup>1</sup>

## **II.2. Pendidikan Politik Kewarganegaraan**

Menumbuhkan rasa kewarganegaraan adalah hal penting bagi setiap negara, karena relasi antara penduduk – masyarakat – negara ditentukan juga oleh rasa kewarganegaraan penduduknya. Memperkuat relasi antara penduduk secara personal dengan masyarakatnya sangat penting karena sebagai anggota dari suatu komunitas mereka berhutang kewajiban satu sama lainnya. Dalam hal ini terdapat hubungan timbal balik antara tanggung jawab social dan hak individu yang direfleksikan dalam sebuah keyakinan yaitu, “tidak ada hak tanpa tanggung jawab”, dengan kata lain penduduk sebagai penerima hak juga sekaligus sebagai pembawa tugas (Giddens, 1998, p. 65 dalam *Political Studies*, 2011: 3, doi: 10.1111/j.1467-9248.2011.00931.x).

---

<sup>1</sup>Anwar Harjono, 1997: 16-23.



Dengan demikian rasa kewarganegaraan adalah tanggung jawab warga Negara terhadap komunitasnya, yang terasa sangat penting bagi pengembangan moral warga negara itu sendiri ditengah-tengah kehidupan masyarakatnya. Penekanan terhadap kewajiban dan moralitas warga negara yang baik, serta hal-hal lainnya yang terkait dengan kebijakan social, memperlihatkan pentingnya pendidikan kewarganegaraan untuk mendorong tidak hanya aktivisme masyarakat melainkan juga partisipasi demokrasi.

Pada Teori Modal Sosial (Social Capital Theory) dinyatakan bahwa interaksi dalam masyarakat atau jaringan social mempunyai nilai-nilai social yang diketahui bersama-sama dan selanjutnya tumbuh sebagai norma timbal balik yang membentuk kualitas dan kuantitas interaksi suatu masyarakat, dengan demikian Modal Sosial mengacu kepada kepercayaan social, norma timbal balik, jaringan masyarakat, lembaga social, dan hubungan social. Teori Modal Sosial ini menunjukkan pentingnya kohesi social bagi masyarakat untuk mencapai kesejahteraan ekonomi dan pembangunan berkelanjutan, serta membantu anak-anak dan generasi muda untuk tumbuh dalam masyarakat yang kompleks dan beragam, juga untuk mengetahui tantangan kesetaraan sesungguhnya. Kondisi yang menunjukkan menurunnya modal social inilah yang bertanggung jawab terhadap perlunya diperkenalkan dan dikembangkan pendidikan kewarganegaraan kepada masyarakat.

Blunkett<sup>2</sup>, menyatakan bahwa tidak adanya Modal Sosial akan menghalangi vitalitas, kesehatan, dan legitimasi demokrasi., juga menyatakan bahwa menurunnya”kohesi social” menyebabkan kenaikan tingkat kenakalan remaja. Dengan demikian, membangun Modal Sosial melalui pendidikan kewarganegaraan akan mendorong keterlibatan dan kontribusi aktif warga negara untuk meregenerasi masyarakat yang terfragmentasi dan membantu masyarakat untuk mencapai potensinya secara keseluruhan. Lebih lanjut Blunkett menyatakan bahwa pendidikan kewarganegaraan dapat memberdayakan dan memberikan keahlian bagi

---

<sup>2</sup> Blunkett, Political Studies, 2011: 4

warga negara mandiri, dan generasi muda merupakan warga negara yang paling ideal untuk memulainya.

Pada beberapa negara maju seperti United Kingdom, Pendidikan kewarganegaraan diperkenalkan dan diberikan, bahkan dengan perancangan yang tepat dimasukkan kedalam kurikulum sekolah, dalam rangka merespon perubahan iklim social dan politik, dan keinginan untuk membangun hubungan yang kuat antara negara dan warga negaranya, melalui partisipasi, social renewal, dan pelaksanaan demokrasi, serta keterlibatan aktif generasi muda pada proses politik. Pendidikan kewarganegaraan juga merupakan cara untuk melakukan sosialisasi kepada generasi memiliki sebagai warga negara. Dengan kata lain, pendidikan kewarganegaraan ditujukan untuk menumbuhkan modal social (Social Capital) maupun modal politik (Politic Capital)

Pada dasarnya Bangsa Indonesia sudah mempunyai konsep nyata yang dapat digunakan untuk wacana pendidikan kewarganegaraan, bahkan pendidikan kewarganegaraan pun sudah lama dimasukkan sebagai bagian dari kurikulum sekolah sejak sekolah dasar. Pancasila sebagai pandangan hidup Bangsa Indonesia merupakan salah satu konsep yang selama ini digunakan sebagai bahan pengenalan pendidikan kewarganegaraan. Pada dasarnya dalam butir-butir Pancasila mengandung nilai-nilai yang dapat sosialisasikan kepada warga Negara untuk menciptakan kohesi social, memperkuat jati diri bangsa, dan memperkuat rasa memiliki sebagai warga negara. Taufik Kiemas (alm) ketua MPR-RI periode 2009 - 2014 mencetuskan suatu sebuah wacana unuk mengembalikan keterpurukan martabat bangsa yang dikenal dengan 4 pilar kebangsaan yaitu: Pancasila, UUD 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhineka Tunggal Ika.

Ironisnya keadaan nyata Bangsa Indonesia menunjukkan rendahnya modal social dan modal politik, yakni kohesi social dalam masyarakat sangat rendah yang ditunjukkan dengan tingginya tingkat kenakalan remaja, tingginya tingkat kejahatan, konflik horizontal, dan banyak lagi penyakit-penyakit social lainnya, yang terus menurunkan martabat sebagai Bangsa

Indonesia. Sedangkan, rendahnya modal politik ditunjukkan dengan ketidakpercayaan terhadap lembaga-lembaga negara dan sistem politik, dan partisipasi politik semu yaitu yang hanya didasarkan pada politik uang.

Jurang pemisah dari kondisi ini adalah tidak adanya metoda dan perancangan metode pendidikan yang tepat bagi warga negara dalam hal ini generasi muda untuk mentransformasikan nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila dan secara keseluruhan di dalam konsepsi 4 pilar kebangsaan. Pengenalan pendidikan kewarganegaraan dengan perancangan yang tepat seharusnya sudah dilakukan sejak sekolah dasar, tetapi transformasi nilai-nilai kebangsaan ini melalui Pendidikan kewarganegaraan tidak hanya melalui sekolah namun harus pula dilakukan melalui lembaga-lembaga social kemasyarakatan seperti, organisasi remaja islam masjid (RISMA), organisasi pemuda karang taruna, dsb. Selanjutnya penting pula dilakukan adalah evaluasi terhadap hasil dan dampak dari pendidikan kewarganegaraan yang telah diberikan.

### **II.3 KONSEPSI EMPAT (4) PILAR KEBANGSAAN**

Penyebutan Empat Pilar kehidupan berbangsa dan bernegara tidaklah dimaksudkan bahwa keempat pilar tersebut memiliki kedudukan yang sederajat. Setiap pilar memiliki tingkat, fungsi, dan konteks yang berbeda. Dalam hal ini, posisi Pancasila tetap ditempatkan sebagai nilai fundamental berbangsa dan bernegara.

Dalam pidato di Perserikatan Bangsa Bangsa, pada 30 September 1960, Presiden Soekarno memperkenalkan Pancasila kepada dunia sebagai konsepsi dan cita-cita bagi suatu bangsa: “Arus sejarah memperlihatkan dengan nyata bahwa semua bangsa memerlukan suatu konsepsi dan cita-cita. Jika mereka tak memilikinya atau jika konsepsi dan cita-cita itu menjadi kabur dan usang, maka bangsa itu adalah dalam bahaya” (Soekarno, 1989). Setiap bangsa memiliki konsepsi dan cita-citanya masing-masing sesuai dengan kondisi, tantangan dan karakteristik bangsa yang bersangkutan. Dalam pandangan Soekarno, “Tidak ada dua bangsa yang cara berjuangya sama.

Tiap-tiap bangsa mempunyai cara berjuang sendiri, mempunyai karakteristik sendiri. Oleh karena pada hakekatnya bangsa sebagai individu mempunyai keperibadian sendiri. Keperibadian yang terwujud dalam pelbagai hal, dalam kebudayaannya, dalam perekonomiannya, dalam wataknya dan lain-lain sebagainya” (Soekarno, 1958).

Konsepsi pokok yang melandasi semua hal itu adalah semangat gotong royong. Bung Karno mengatakan, “Gotong royong adalah paham yang dinamis, lebih dinamis dari kekeluargaan. Saudara-saudara! Kekeluargaan adalah satu paham yang statis, tetapi gotong royong menggambarkan satu usaha, satu amal, satu pekerjaan. Gotong royong adalah pembantingan tulang bersama, perjuangan bantu membantu bersama. Amal semua buat kepentingan semua, keringat semua buat kebahagiaan semua. Holopis kuntul baris, buat kepentingan bersama! Itulah gotong royong.”<sup>3</sup> Dengan semangat gotong royong itu, konsepsi tentang dasar negara dirumuskan dengan merangkum lima prinsip utama (sila) yang menyatukan dan menjadi haluan keindonesian, yang dikenal sebagai Pancasila. Kelima sila itu terdiri atas: 1) Ketuhanan Yang Maha Esa; 2) Kemanusiaan yang adil dan beradab; 3) Persatuan Indonesia; 4) Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan; 5) Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Konsepsi 4 pilar kebangsaan yang kedua adalah, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mempunyai fungsi sebagai hukum dasar menyangkut tujuan dan cita-cita bersama, the rule of law sebagai landasan penyelenggaraan negara, serta bentuk institusi dan prosedur ketatanegaraan. Undang-Undang Dasar menjadi pedoman bagi pelaksanaan ”demokrasi konstitusional” (constitutional democracy), yakni praktik demokrasi yang tujuan ideologis dan teleologisnya adalah pembentukan dan pemenuhan konstitusi.

---

<sup>3</sup>(dikutip dari Pidato Bung Karno, 1 Juni 1945).

Konsepsi 4 Pilar kebangsaan yang ketiga adalah, Bhineka Tunggal Ika. Definisi dari bhineka adalah beraneka ragam, atau berbeda-beda, tunggal ika adalah satu. Bhineka Tunggal Ika berasal dari Kitab Sutasoma karangan Mpu Tantular pada masa kerajaan Majapahit, kutipannya adalah: *Rwāneka dhātu winuwus Buddha Wiswa, Bhinnēki rakwa ring apan kena parwanosen, Mangka ng Jinatwa kalawan Śiwatatwa tunggal, Bhinnēka tunggal ika tan hana dharma mangrwa*. Jika diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia adalah: “Konon Buddha dan Siwa merupakan dua zat yang berbeda. Mereka memang berbeda, tetapi bagaimanakah bisa dikenali? Sebab kebenaran Jina (Buddha) dan Siwa adalah tunggal Terpecah belahlah itu, tetapi satu jugalah itu. Tidak ada kerancuan dalam kebenaran.

Terdapat wawasan ”ke-eka-an” yang berusaha mencari titik-temu dari segala kebhinnekaan yang terkristalisasi dalam dasar negara (Pancasila), Undang-Undang Dasar dan segala turunan perundang-undangannya, negara persatuan, bahasa persatuan, dan simbol-simbol kenegaraan lainnya. Di sisi lain, ada wawasan kebhinnekaan yang menerima dan memberi ruang hidup bagi aneka perbedaan, seperti aneka agama/keyakinan, budaya dan bahasa daerah, serta unit-unit politik tertentu sebagai warisan tradisi budaya.

Konsepsi 4 pilar kebangsaan yang keempat adalah, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), yang terdiri dari wawasan Nusantara dan Wawasan Kebangsaan. Wawasan Nusantara adalah cara kita memandang diri kita sebagai bangsa Indonesia beserta nusantara sebagai lingkungannya itu sebagai apa. Kita memandang bangsa Indonesia dengan nusantara-nya merupakan satu kesatuan. Hakekat Wawasan Nusantara adalah keutuhan bangsa & kesatuan wilayah nasional. Wawasan Nusantara berkedudukan sebagai visi bangsa dalam paradigma nasional. Visi adalah keadaan atau rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan

Wawasan Kebangsaan adalah kesepakatan nasional yang mengandung konsep jati diri setiap warga Negara sebagai bagian dari anggota Bangsa Indonesia. Konsep Jati diri Bangsa Indonesia tersebut adalah sebagai berikut: *Pertama*, Penghargaan terhadap harkat dan martabat manusia sebagai makhluk

ciptaan Tuhan Yang Maha Kuasa. *Kedua*, tekad bersama untuk berkehidupan kebangsaan yang bebas, merdeka dan bersatu. *Ketiga*, cinta akan Tanah Air dan Bangsa. *Keempat*, demokrasi dan kedaulatan rakyat. *Kelima*, Kesetiakawanan Sosial. *Keenam*, masyarakat adil dan makmur.

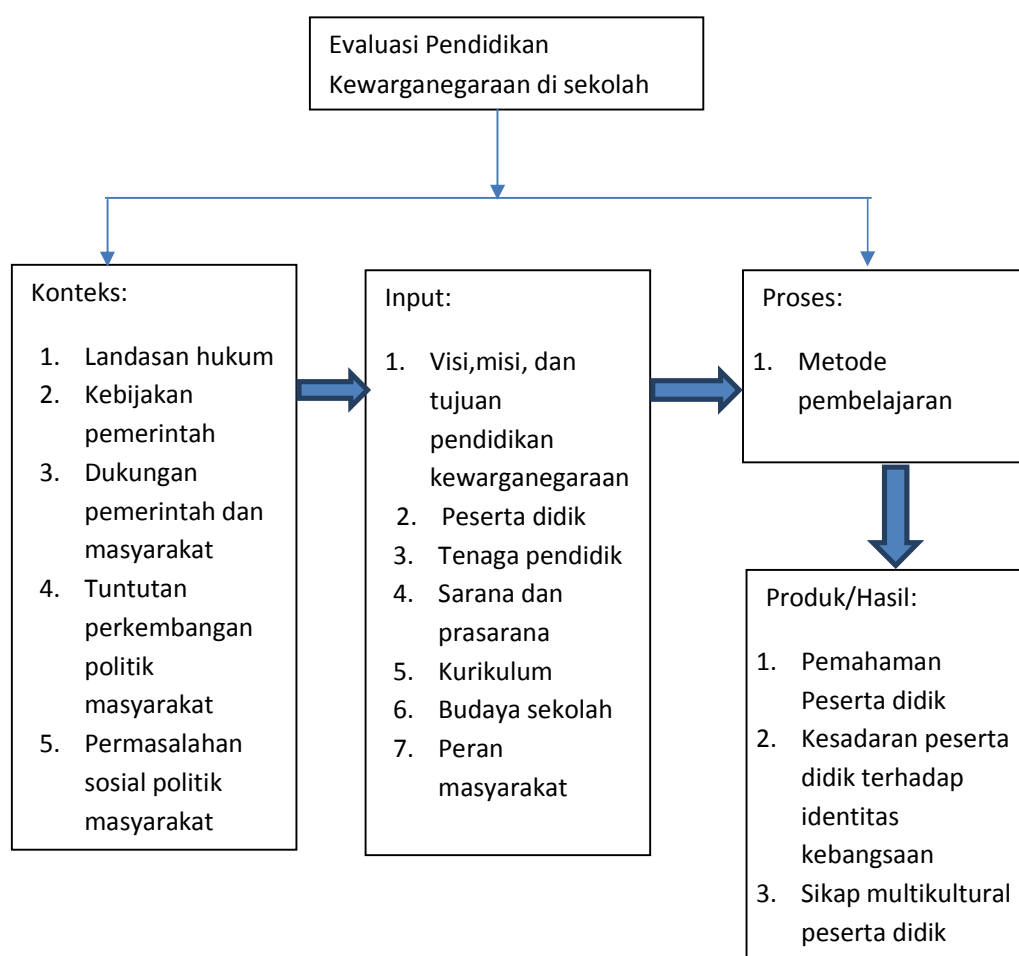
### III. METODE PENELITIAN

#### 3.1 Teknik Penggalan Data

Data akan diperoleh sesuai dengan rancangan evaluasi terhadap pelaksanaan pembelajaran pendidikan kewarganegaraan di sekolah-sekolah menengah atas di Kota Bandar Lampung. Rancangan evaluasi adalah desain penelitian evaluasi yang menentukan bahwa orang-orang yang terlibat dalam evaluasi adalah orang-orang yang tepat, yaitu orang-orang yang akan menjadi sumber informasi, tempat melakukan evaluasi, serta informasi dan data yang tepat untuk melakukan evaluasi. Responden penelitian merupakan siswa kelas XII sekolah menengah atas negeri di kota Bandar Lampung yang berjumlah 19 sekolah.

Desain evaluasi yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah model desain CIPP (Context, Input, Proses, Product). **Evaluasi terhadap konteks** dilakukan untuk menilai kebutuhan, masalah, aset, dan peluang yang dapat digunakan untuk membuat prioritas dan tujuan. **Evaluasi terhadap input** dilakukan untuk menilai alternatif pendekatan, rencana tindak, dan keberlangsungan program dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. **Evaluasi proses** ditujukan untuk menilai implementasi dari rencana yang telah ditetapkan dan membantu para pengguna yang lain untuk mengetahui kinerja program dan memperkirakan hasilnya. Evaluasi produk dilakukan untuk mengidentifikasi dan menilai yang dicapai yang diharapkan dan yang tidak diharapkan, jangka panjang dan jangka pendek baik bagi pelaksana pendidikan

agar lebih fokus dalam mencapai sasaran program maupun bagi pihak lain. Evaluasi terhadap produk atau hasil ini dapat dibagi kedalam penilaian terhadap dampak, efektifitas, keberlanjutan, dan daya adaptasi. (Stufflebeam, et al. 2003). Adapun desain model CIPP dalam penelitian evaluasi pendidikan kewarganegaraan terhadap pembentukan identitas politik kebangsaan dijelaskan dalam skema di bawah ini:



Gambar 1: Desain Evaluasi Pendidikan Kewarganegaraan Model CIPP



Instrumen penelitian evaluasi dengan menggunakan model CIPP maka akan terdiri dari 4 variabel yaitu, konteks yang terdiri dari 5 aspek, input yang terdiri dari 7 aspek, proses yang terdiri dari 1 aspek, dan prosuk yang terdiri dari 3 aspek.

### **3.3 Teknik Penskoran Data pada Instrumen Penelitian**

Menghitung tingkat evaluasi program sekolah digunakan rumus sebagai

berikut.  $M (\%) = (M/SMI) \times 100\%$

Keterangan :

$M (\%) =$  Rata-rata

$M =$  Rata-rata skor

$SMI =$  Skor Maksimal Ideal

Tingkat evaluasi program sekolah yang diperoleh anak hasilnya dikonversikan dengan cara membandingkan angka rata-rata persen dengan kriteria penilaian acuan patokan (PAP) skala lima. (Agung, 2014)

#### **1.4.3 Instrumen Penelitian**

Instrumen penelitian merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kualitas hasil penelitian. Instrumen yang digunakan terlebih dahulu harus di uji validitas dan uji reliabilitas. Validitas alat ukur adalah ketepatan alat ukur dengan hal yang diukur. Menurut Koyan, 2013: 131 memaparkan ada beberapa jenis validitas alat ukur, yaitu: (1) Validitas isi (*content validity*), (2) validitas konstruksi (*construct validity*), (3) validitas ramalan (*predictive validity*), dan (4) validitas kesamaan (*concurrent validity*). Sedangkan reliabilitas alat ukur adalah keterandalan alat ukur atau keajegan alat ukur; artinya, kapanpun alat ukur itu digunakan akan menghasilkan hasil ukur yang relative tetap. Ada beberapa jenis

### **Persentase Kriteria Evaluasi Program Sekolah**

90 –100	Sangat tinggi
80 –89	Tinggi
65 –79	Sedang
40–64	Rendah
0 –36	Sangat rendah

reliabilitas, yaitu: (1) konsistensi internal, (2) stabilitas, dan (3) ekuivalen.

Adapun

hasil uji validitas dari 60 butir pernyataan/pertanyaan yang sudah dikembangkan menunjukkan bahwa terdapat 26 butir yang valid dan 34 butir yang tidak valid.

Dan

untuk hasil uji reliabilitas butir pernyataan/pertanyaan mendapat skor 0,99 sehingga sesuai kriteria yang dikemukakan oleh **Guilford** (1951) menunjukkan bahwa butir tersebut berada pada rentangan 0,80 – 1,00 yaitu sangat tinggi.

### **1.5 Metode dan Teknik Analisis Data**

Setelah data dalam penelitian ini terkumpul, selanjutnya dilakukan analisis data. Dalam penelitian ini menggunakan metode analisis statistik deskriptif dan metode analisis statistik deskriptif kuantitatif. Kedua jenis metode analisis data tersebut dijelaskan sebagai berikut.

#### **3.5.1 Metode Analisis Statistik Deskriptif**

Analisis deskriptif kuantitatif adalah suatu cara pengolahan data yang dilakukan dengan jalan menerapkan teknik dan rumus-rumus statistik deskriptif seperti distribusi frekuensi, grafik, angka rata-rata (*Mean*), *median* (Me) dan *modus* (Mo) untuk menggambarkan keadaan suatu objek tertentu sehingga di peroleh kesimpulan umum. Dalam penerapan metode analisis statistik deskriptif,

data yang diperoleh dari hasil penelitian disajikan ke dalam 1) tabel distribusi frekuensi, 2) menghitung angka rata-rata *arithmetic mean* (M), 3) menghitung *modus* (Mo), 4) menghitung *median* (Me), 5) menyajikan ke dalam grafik *polygon*.

### **3.5.2 Teknik Analisis Data**

Analisis data adalah data yang diperoleh dari hasil kuesioner dan wawancara, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan mana yang akan dipelajari, serta membuat kesimpulan, sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain (Sugiyono, 2010). Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa teknik analisis data adalah suatu cara yang digunakan peneliti dalam proses mencari dan menyusun data secara sistematis. Data yang diperoleh dari penelitian dengan menggunakan berbagai teknik pengumpulan data akan menjadi beragam. Oleh karena itu, teknik analisis data yang dilakukan dibagi menjadi tiga tahap. Analisis data yang dilakukan selama proses yaitu analisis sebelum memasuki lapangan, analisis selama peneliti masih berada di lapangan, dan analisis setelah pengumpulan data berakhir.



## BAB IV ANALISA DAN PEMBAHASAN

Evaluasi pendidikan kewarganegaraan dalam membentuk kesadaran politik dan identitas kebangsaan. Dalam rangka melakukan evaluasi pendidikan terlebih dahulu harus diketahui komponen input dalam proses evaluasi, yaitu sebagai berikut:

### I. Komponen – Komponen dalam Pendidikan Kewarganegaraan

Komponen dalam pendidikan Kewarganegaraan adalah materi yang diajarkan kepada siswa yang terdapat dalam buku Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan edisi revisi tahun 2018. Komponen yang diuraikan di bawah ini adalah materi kelas X, XI, dan XII, sebagai berikut;

#### a. Kelas X

1.	Pembelajaran nilai-nilai Pancasila dalam Kerangka Praktik Penyelenggaraan Negara
2.	Pembelajaran Ketentuan UUD NRI tahun 1945 dalam kehidupan berbangsa dan bernegara
3	Pembelajaran kewenangan lembaga-lembaga negara menurut UUD Tahun 1945
	Pembelajaran Hubungan Struktural dan Fungsional Pemerintah Pusat dan Daerah
	Pembelajaran integrasi Nasional dan Bhinneka Tunggal Ika
	Wawasan Nusantara dalam Konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia

#### b. Kelas XI

	Harmonisasi Hak dan Kewajiban Asasi Manusia dalam Perspektif Pancasila: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Konsep Hak dan Kewajiban Asasi Manusia</li> <li>- Subtansi Hak dan Kewajiban Asasi Manusia dalam Pancasila</li> <li>- Kasus Pelanggaran Hak Asasi Manusia</li> <li>- Upaya penegakan Hak asasi manusia</li> </ul>
2.	Sistem dan Dinamika Demokrasi Pancasila: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Hakikat Demokrasi</li> <li>- Dinamika Penerapan Demokrasi Pancasila</li> </ul>

	- Membangun kehidupan yang Demokratis di Indonesia
3	Sistem Hukum dan Peradilan di Indonesia - Sistem hukum di Indonesia - Mencermati Sistem Peradilan di Indonesia - Menampilkan Sikap yang sesuai dengan hukum

c. Kelas XII

1.	Kasus-Kasus Pengingkaran Hak Azasi Manusia dan Pelanggaran Warga Negara
2.	Dinamika Persatuan dan Kesatuan Bangsa dalam Konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia
3	Pengaruh Kemajuan IPTEK terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia
4	Perlindungan dan Penegakan Hukum di Indonesia

Dari tabel di atas komponen utama dalam Pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan adalah:

1. Nilai-Nilai Pancasila
2. UUD Negara Republik Indonesia Tahun 2015
3. Hak Azasi Manusia
4. Kewajiban Warga Negara
5. Sistem Hukum dan Peradilan di Indonesia
6. Struktur Pemerintahan Pusat dan Daerah

II. Metode Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Pendidikan kewarganegaraan untuk kelas X, XI, dan XII mempunyai 4 kompetensi inti dan 28 kompetensi dasar Dalam proses pembelajarannya KI-3 (pengetahuan) dan KI-4 (keterampilan) disajikan melalui pembelajaran langsung (direct teaching). Sedangkan KI-1 (sikap spiritual) dan KI-2 (sikap sosial).

Metode pengajaran yang diberikan kepada siswa bagi mata pelajaran PPKn sesuai dengan kompetensi yang akan dicapai, yaitu sebagai berikut:

- Kompetensi pengetahuan, dilaksanakan melalui pembelajaran tidak langsung (indirect teaching),
- Kompetensi keterampilan, dilaksanakan melalui keteladanan, ekosistem pendidikan, Guru mengembangkan sikap sosial dengan memperhatikan karakteristik, kebutuhan, dan kondisi peserta didik.

- Kompetensi sikap spiritual dan sikap sosial dalam mata pelajaran PPKn ditumbuhkan sebagai akibat dari kompetensi pengetahuan dan keterampilan Metode pengajaran yang digunakan dari masing-masing pencapaian kompetensi yang akan dicapai saling terkait, contohnya mempelajari Wawasan Nusantara menumbuhkan sikap peduli, maka untuk memberikan dampak pengiring atau mutual effect proses pembelajaran dirancang dapat menumbuhkan sikap spiritual dan sikap social yaitu sikap toleransi dan sikap kerja samamaka proses pembelajaran dilakukan dengan diskusi kelompok. Berikut penyebaran kompetensi inti dan kompetensi dasar Mata pelajaran PPKn yang merupakan nilai, sikap dan watak yang menjadi tujuan pemberian mata pelajaran PPKn.

### III. Nilai, Sikap, dan Watak yang Terangkum dalam Tujuan Mata Pelajaran PPKn

Pada table di bawah ini diuraikan nilai, sikap dan watak yang merukan tujuan pemberian mata pelajaran PPKn, yaitu sebagai berikut:

Tabel 4: Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar Mata Pelajaran PPKN

<b>KOMPETENSI INTI 1 (SIKAP SPIRITUAL)</b>	<b>KOMPETENSI INTI 2 (SIKAP SOSIAL)</b>
1. Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya.	2. Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli (gotong royong, kerja sama, toleran, damai), santun, responsif dan pro-aktif dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia.
<b>KOMPETENSI DASAR</b>	<b>KOMPETENSI DASAR</b>
1.1. Menghayati nilai-nilai Pancasila dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan negara sebagai salah satu bentuk pengabdian kepada Tuhan Yang Maha Esa.	2.1. Mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintah Negara.

1.2. Menghayati nilai-nilai konstitusional ketentuan UUD Negara RI Tahun 1945 yang mengatur tentang wilayah negara, warga negara dan penduduk, agama dan kepercayaan, pertahanan dan keamanan secara adil.	2.2. Mengamalkan nilai-nilai yang terkandung dalam UUD Negara RI Tahun 1945 yang mengatur tentang wilayah negara, warga negara dan penduduk, agama dan kepercayaan, pertahanan dan keamanan .
1.3. Menghayati nilai-nilai terkait fungsi lembaga-lembaga Negara menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara adil.	2.3. Mengamalkan nilai-nilai terkait fungsi lembaga-lembaga negara menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
1.4. Menghayati nilai-nilai tentang hubungan struktural dan fungsional pemerintahan pusat dan daerah menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 secara adil.	2.4. Menunjukkan nilai-nilai tentang hubungan struktural dan fungsional pemerintahan pusat dan daerah menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
1.5. Mensyukuri nilai-nilai yang membentuk komitmen integrasi nasional dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika.	2.5. Mengamalkan nilai-nilai yang membentuk komitmen integrasi nasional dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika.
1.6. Mensyukuri nilai-nilai yang membentuk kesadaran ancaman terhadap negara dan upaya penyelesaiannya di bidang Ipoleksosbudhankam dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika.	2.6. Mengamalkan nilai-nilai ketahanan terkait ancaman terhadap negara dan upaya penyelesaiannya dibidang Ipoleksosbudhankam dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika.
1.7. Menghayati nilai-nilai pentingnya wawasan nusantara dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia secara adil.	2.7. Mengembangkan nilai-nilai tentang pentingnya wawasan nusantara dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia.
<b>KOMPETENSI INTI 3 (PENGETAHUAN)</b>	<b>KOMPETENSI INTI 4 (KETERAMPILAN)</b>
3. Memahami, menerapkan,	4. Mengolah, menalar, dan menyaji



<p>menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah.</p>	<p>dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, dan mampu menggunakan metoda sesuai kaidah keilmuan.</p>
<b>KOMPETENSI DASAR</b>	<b>KOMPETENSI DASAR</b>
3.1. Menganalisis nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan negara.	4.1. Mengambil keputusan bersama sesuai nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan negara.
3.3. Menganalisis kewenangan lembaga-lembaga negara menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.	4.3. Menyaji hasil analisis tentang kewenangan lembaga-lembaga negara menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.4. Menganalisis hubungan struktural dan fungsional pemerintahan pusat dan daerah menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.	4.4. Menyaji hasil analisis tentang hubungan struktural dan fungsional pemerintahan pusat dan daerah menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.5. Menganalisis faktor-faktor pembentuk integrasi nasional dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika.	4.5. Menyaji hasil analisis tentang faktor-faktor pembentuk integrasi nasional dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika.
3.6. Menganalisis indikator ancaman terhadap negara dan upaya penyelesaiannya di bidang ipoleksosbudhankam dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika.	4.6. Menyaji hasil analisis tentang ancaman terhadap negara dan upaya penyelesaiannya di bidang ipoleksosbudhankam.
3.7. Menganalisis arti pentingnya	4.7. Mengambil keputusan bersama

Wawasan Nusantara dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia.	terkait arti pentingnya Wawasan Nusantara dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia.
---	---

Tabel 5. Rumusan Indikator Kompetensi Peningkatan Kesadaran Politik

Kompetensi Inti	Kompetensi Dasar	Indikator
1. Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, dan mampu menggunakan metoda sesuai kaidah keilmuan.	1. Mengambil keputusan bersama sesuai nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan Negara.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menyaji hasil analisis tentang pengambilan keputusan bersama sesuai nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan Negara.</li> <li>- Mengkomunikasikan hasil analisis terkait dengan pengambilan keputusan bersama sesuai nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan Negara.</li> </ul>

	<p>2. Menyaji hasil analisis tentang ketentuan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengatur wilayah negara, warga negara dan penduduk, agama dan kepercayaan, serta pertahanan dan keamanan.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menyaji hasil telaah analisis tentang ketentuan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengatur wilayah negara, warga negara dan penduduk, agama dan kepercayaan, serta pertahanan dan keamanan.</li> <li>- Mengkomunikasikan hasil telaah isi analisis tentang ketentuan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengatur wilayah negara, warga negara dan penduduk, agama dan kepercayaan, serta pertahanan dan keamanan.</li> </ul>
	<p>3. Menyaji hasil analisis tentang kewenangan lembaga-lembaga Negara menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menyaji hasil analisis tentang kewenangan lembaga-lembaga Negara menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.</li> <li>- Mengkomunikasikan hasil telaah analisis tentang kewenangan lembaga-lembaga Negara menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.</li> </ul>
	<p>4. Menyaji hasil analisis tentang hubungan struktural dan fungsional pemerintahan pusat dan daerah menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menyaji hasil telaah hubungan struktural dan fungsional pemerintahan pusat dan daerah menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.</li> <li>- Mengkomunikasikan hasil telaah hubungan struktural dan fungsional pemerintahan pusat dan daerah menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.</li> </ul>

	<p>5. Menyaji hasil analisis tentang faktor-faktor pembentuk integrasi nasional dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menyaji hasil analisis tentang faktor-faktor pembentuk integrasi nasional dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika.</li> <li>- Mengkomunikasikan hasil analisis tentang faktor-faktor pembentuk integrasi nasional dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika.</li> </ul>
	<p>6. Menyaji hasil analisis tentang ancaman terhadap negara dan upaya penyelesaiannya di bidang ipoleksosbudhankam.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menyaji hasil analisis tentang ancaman terhadap negara dan upaya penyelesaiannya di bidang ipoleksosbudhankam.</li> <li>- Mengkomunikasikan hasil analisis tentang ancaman terhadap negara dan upaya penyelesaiannya di bidang poleksosbudhankam.</li> </ul>
	<p>7. Mengambil keputusan bersama terkait arti pentingnya wawasan nusantara dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menyaji hasil analisis tentang pentingnya wawasan nusantara dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia.</li> <li>- Mengkomunikasikan hasil analisis penting wawasan nusantara dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia.</li> </ul>

#### **IV. Peningkatan Kesadaran Politik dan Pembentukan Identitas Politik Siswa**

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) memiliki visi dan misi mengembangkan peserta didik menjadi manusia yang memiliki *rasa kebangsaan* dan cinta tanah air, melalui proses menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya; dan memiliki perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, dan guru. Untuk itu dikembangkan substansi pembelajaran yang dijiwai oleh 4 konsensus kebangsaan yaitu (1) Pancasila, sebagai dasar negara; (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai hukum dasar yang menjadi landasan konstitusional kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara; (3) Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagai bentuk final Negara Republik Indonesia yang melindungi segenap bangsa dan tanah tumpah darah Indonesia; (4) Bhinneka Tunggal Ika, sebagai wujud komitmen keberagaman kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang utuh dan kohesif secara nasional dan harmonis dalam pergaulan antarbangsa. Kegiatan pembelajaran untuk mencapai penguasaan kompetensi pendidikan kewarganegaraan (sikap kewarganegaraan, pengetahuan kewarganegaraan, dan keterampilan kewarganegaraan) sebagaimana termaktub dalam silabus menitik-

pada pembentukan karakter warga negara Indonesia yang beriman, bertaqwa, dan berakhlak mulia serta demokratis dan bertanggung jawab sebagaimana termaktub dalam Pasal 31 ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia 1945 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pengembangan sikap kewarganegaraan, pengetahuan kewarganegaraan, dan keterampilan kewarganegaraan secara utuh menjadi karakter diorganisasikan melalui pengembangan dampak instruksional, dampak pengiring, dan budaya kewarganegaraan dalam lingkungan belajar yang menarik, menyenangkan dan membelajarkan sepanjang hayat. Untuk itu perlu dikembangkan berbagai model pembelajaran dan lingkungan belajar di kelas, diluar kelas, dan dalam masyarakat serta jaringan (*virtual*).

#### **a. Peningkatan Partisipasi**

Dalam tinjauan pedagogik, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) merupakan bidang kajian keilmuan, program kurikuler, dan aktivitas sosial-kultural yang bersifat multidimensional. Sifat multidimensional ini menyebabkan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dapat disikapi sebagai pendidikan nilai dan moral, pendidikan kemasyarakatan, pendidikan kebangsaan, pendidikan kewarganegaraan, pendidikan politik, pendidikan hukum dan hak asasi manusia, serta pendidikan demokrasi.

Di Indonesia, arah pengembangan pendidikan kewarganegaraan tidak boleh keluar dari landasan ideologi Pancasila, landasan konstitusional

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan landasan operasional Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Selain itu, tidak boleh jugakeluar dari koridor Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan filosofi Bhinneka Tunggal Ika. Hal ini yang menyebabkan secara terminologi untuk pendidikan kewarganegaraan di Indonesia digunakan istilah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan.

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan merupakan mata pelajaran yang mempunyai misi sebagai pendidikan nilai dan moral Pancasila, kesadaran akan norma dan konstitusi UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengembangan komitmen terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dan penghayatan terhadap filosofi Bhinneka Tunggal Ika. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dimaksudkan sebagai upaya membentuk peserta didik menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air yang dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, semangat Bhinneka Tunggal Ika, dan komitmen Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Oleh karena itu, secara umum pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di sekolah adalah upaya mengembangkan kualitas warga negara secara utuh dalam berbagai aspek sebagai berikut.

1. Kemelekwanusiaan sebagai warga negara (*civic literacy*), yakni pemahaman peserta didik sebagai warga negara tentang hak dan kewajiban warga negara dalam kehidupan demokrasi konstitusional Indonesia serta menyesuaikan

- perilakunya dengan pemahaman dan kesadaran itu.
2. Komunikasi sosial kultural kewarganegaraan (*civic engagement*), yakni kemauan dan kemampuan peserta didik sebagai warga negara untuk melibatkannya dalam komunikasi sosial-kultural sesuai dengan hak dan kewajibannya.
  3. Kemampuan berpartisipasi sebagai warga negara (*civic skill and participation*), yakni kemauan, kemampuan, dan keterampilan peserta didik sebagai warga negara dalam mengambil prakarsa dan/atau turut serta dalam pemecahan masalah sosial-kultural kewarganegaraan di lingkungannya.
  4. Penalaran kewarganegaraan (*civic knowledge*), yakni kemampuan peserta didik sebagai warga negara untuk berpikir secara kritis dan bertanggung jawab tentang ide, instrumentasi, dan praksis demokrasi konstitusional Indonesia.
  5. Partisipasi kewarganegaraan secara bertanggung jawab (*civic participation and civic responsibility*), yakni kesadaran dan kesiapan peserta didik sebagai warga negara untuk berpartisipasi aktif dan penuh tanggung jawab dalam berkehidupan demokrasi konstitusional. (Dokumen SKGK Depdiknas, 2004).

#### **b. Peningkatan Rasa Cinta Tanah Air**

Sesuai dengan PP Nomor 32 Tahun 2013 Penjelasan Pasal 77b Ayat (1)



Huruf ditegaskan bahwa Pendidikan Kewarganegaraan dimaksudkan untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air dalam konteks nilai dan moral Pancasila, kesadaran berkonstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, nilai dan semangat Bhinneka Tunggal Ika, serta komitmen Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Secara umum tujuan dari mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) pada jenjang pendidikan dasar dan menengah adalah mengembangkan potensi peserta didik dalam seluruh dimensi kewarganegaraan, yakni

- a. Sikap kewarganegaraan termasuk keteguhan, komitmen dan tanggung jawab kewarganegaraan (*civic confidence, civic commitment, and civic responsibility*). Pengetahuan kewarganegaraan.
- b. Keterampilan kewarganegaraan termasuk kecakapan dan partisipasi kewarganegaraan (*civic competence and civic responsibility*).

Secara khusus Tujuan PPKn yang berisikan keseluruhan dimensi tersebut dimaksudkan agar peserta didik memiliki kemampuan sebagai berikut.

- a. Menampilkan karakter yang mencerminkan penghayatan, pemahaman, dan pengamalan nilai dan moral Pancasila secara personal dan sosial.
- b. Memiliki komitmen konstitusional yang ditopang oleh sikap positif dan pemahaman tentang Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945.

- c. Berpikir secara kritis, rasional, dan kreatif serta memiliki semangat kebangsaan serta cinta tanah air yang dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, semangat Bhinneka Tunggal Ika, dan komitmen Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- d. Berpartisipasi secara aktif, cerdas, dan bertanggung jawab sebagai anggota masyarakat, tunas bangsa, dan warga negara sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang hidup bersama dalam berbagai tatanan sosial budaya.

Tujuan akhir dari Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan adalah terwujudnya warganegara yang cerdas dan baik, yakni warganegara yang bercirikan tumbuh kembangnya kepekaan, ketanggapan, kritisasi, dan kreativitas sosial dalam konteks kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara secara tertib, damai, dan kreatif, sebagai cerminan dan pengejawantahan nilai, norma, dan moral Pancasila. Peserta didik dikondisikan untuk selalu bersikap kritis dan berperilaku kreatif sebagai anggota keluarga, warga sekolah, anggota masyarakat, warga negara, dan umat manusia di lingkungannya secara cerdas dan baik. Proses pembelajaran diorganisasikan dalam bentuk belajar sambil berbuat (**learning by doing**), belajar memecahkan masalah sosial (**social problems solving learning**), belajar melalui partisipasi sosial (**socio participatory learning**), dan belajar melalui interaksi sosial-

kultural sesuai dengan konteks kehidupan masyarakat.



## BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

### V.I. KESIMPULAN

1. Komponen dalam pendidikan Kewarganegaraan adalah materi yang diajarkan kepada siswa yang terdapat dalam buku Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan yang telah meliputi komponen untuk memenuhi indikator pembentukan kesadaran politik siswa, dan strategi pembelajaran pendidikan Kewarganegaraan juga telah menggunakan strategi partisipasi dalam lingkungan tempat tinggal untuk meningkatkan partisipasi, menggunakan strategi kegiatan di sekolah untuk meningkatkan toleransi dan untuk meningkatkan kesadaran sebagai warga negara dilakukan strategi partisipasi beberapa stake holder terkait seperti penyelenggara pemilu, kepolisian.
2. Pembentukan identitas kebangsaan pada komponen dalam pendidikan Kewarganegaraan adalah materi yang diajarkan kepada siswa untuk meningkatkan pembentukan identitas kebangsaan belum tercakup dalam materi yang diajarkan, oleh karena itu strategi pembelajaran untuk mencapai pembentukan identitas kebangsaan siswa belum dilakukan

## V.2. SARAN

### Saran

ataurekomendasipenelitianiniadalahmelengkapimateripendidikankewarganegaraan yang memenuhi indicator pembentukan identitas kebangsaan disertai dengan strategi pembelajarannya yaitu sebagai berikut:

Kompetensi Dasar	Materi	Model Pembelajaran
1. Mensyukuri nilai-nilai yang membentuk komitmen integrasi nasional dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika.	1. Konsep integrasi nasional 2. Faktor-faktor pembentuk integrasi nasional. 3. Kebhinekaan Bangsa Indonesia	1. Memanfaatkan teknologi Informasi dan komunikasi (TIK). 2. Debat pro-kontra Contoh: Peserta didik secara berkelompok ditugasi untuk mencari informasi dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi tentang faktor-faktor pembentuk integrasi nasional, kemudian
2. Mengamalkan nilai-nilai yang membentuk komitmen	4. Tantangan dalam menjaga keutuhan negara	

<p>integrasi nasional dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika.</p> <p>3. Menganalisis faktor-faktor pembentuk integrasi nasional dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika</p> <p>4. Menyaji hasil analisis tentang faktor-faktor pembentuk integrasi nasional dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika.</p>	<p>Kesatuan Republik Indonesia</p> <p>a</p> <p>5. Peran serta warga negara dalam menjaga Persatuan dan Kesatuan Bangsa</p>	<p>mempresentasikan hasilnya di depan kelas.</p> <p>Peserta didik melakukan debat pro-kontra tentang tantangan dalam menjaga keutuhan NKRI.</p>
--	--	---

## DAFTAR PUSTAKA

- Agung, A. A. Gede. 2014. *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Malang: Aditya Media Publising.
- Departemen Pendidikan Nasional. 2009. *Evaluasi Program Pendidikan*. Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta.
- Direktorat Tenaga Kependidikan. 2008. *Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan*. Jakarta: Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan.
- Harjono, Anwar, 1997. *Perjalanan Politik Bangsa*, Jakarta, Gema Insani Press
- Koyan, I Wayan dan A. A. Gede Agung. 2012. *Evaluasi Program Pendidikan*. Singaraja: Universitas Pendidikan Ganesha.
- Koyan, I Wayan. 2013. *Asesmen dalam Pendidikan*. Singaraja: Universitas Pendidikan Ganesha Press.
- \_\_\_\_\_, 2012. *Statistik Pendidikan Teknik Analisis Data Kuantitatif*. Singaraja: Universitas Pendidikan Ganesha Press.
- Tayibnaxis, Farida Yusuf. 1989. *Evaluasi Program*. Jakarta: IKIP.